

THE APPROVAL OF THE NOTARY HONORARY ASSEMBLY IN THE SUMMONING OF NOTARIES FOR THE BENEFIT OF CRIMINAL JUSTICE PROCESS

Vania Twidesyadinda^{*3} and Supriyadi^{*4}

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the urgency of the approval of the Notary Honorary Council regarding the summons of a Notary for the benefit of the criminal justice process in Article 66 paragraph (1) of the UUJNP and to find out and analyze the suitability of the Notary Honorary Council approval arrangement regarding the summons of a Notary for the benefit of the criminal justice process in Article 66 paragraph (1) UUJNP with the principle of *equality before the law*.

The type of research used is normative juridical law research, namely research conducted with literature and based on secondary data. The data is then analyzed by qualitative research which is presented in the form of descriptions, which are studied using inductive thinking methods so as to produce a conclusion which is then presented descriptively.

This study has two conclusions. First, the urgency of setting up the approval of the Notary Honorary Council regarding the summons of a Notary for the benefit of the criminal justice process in Article 66 paragraph (1) of the UUJNP is as a form of legal protection and an initial selection (filter) for a Notary to provide a prior assessment of each implementation of a Notary's duties and positions. has complied with UUJN or not as well as protection from arbitrary actions of investigators, public prosecutors and judges related to the process of summoning a Notary in the criminal justice process. Second, the arrangement for the approval of the Notary Honorary Council regarding the summons of a Notary for the benefit of the criminal justice process in Article 66 paragraph (1) of the JNP has conformity with the principle of *equality before the law*. This rule is a natural thing and does not conflict with the principle of *equality before the law* because a Notary is a public official whose dignity, status and position must be maintained. However, for the person of a Notary, the principle of *equality before the law* is the same as for other citizens.

Keywords: Honorary Council of Notaries, Summons of Notaries, Criminal Justice Process, Principles of *Equality Before The Law*

³Master Student of Notary Law Faculty of Gadjah Mada University (vaniatwidesyadinda@mail.ugm.ac.id)

⁴Lecture of Master of Notary Law Faculty of Gadjah Mada University (supriyadi@ugm.ac.id)

**PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM
PEMANGGILAN NOTARIS UNTUK KEPENTINGAN
PROSES PERADILAN PIDANA**

Oleh:

Vania Twidesyadinda^{*1} dan Supriyadi^{*2}

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pengaturan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terkait pemanggilan Notaris untuk kepentingan proses peradilan pidana dalam Pasal 66 ayat (1) UUJNP serta mengetahui dan menganalisis kesesuaian pengaturan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terkait pemanggilan Notaris untuk kepentingan proses peradilan pidana dalam Pasal 66 ayat (1) UUJNP dengan prinsip *equality before the law*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan kepustakaan dan didasarkan oleh data sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis dengan penelitian kualitatif yang disajikan dalam bentuk uraian-uraian, yang dikaji dengan metode berfikir induktif sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang kemudian disajikan secara dekriptif.

Penelitian ini memiliki dua kesimpulan. Pertama, urgensi pengaturan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terkait pemanggilan Notaris untuk kepentingan proses peradilan pidana dalam Pasal 66 ayat (1) UUJNP adalah sebagai bentuk perlindungan hukum dan seleksi awal (*filter*) bagi Notaris untuk memberikan penilaian terlebih dahulu atas setiap pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris apakah telah sesuai dengan UUJN atau belum serta sebagai perlindungan dari tindakan sewenang-wenang penyidik, penuntut umum dan hakim terkait proses pemanggilan Notaris dalam proses peradilan pidana. Kedua, pengaturan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terkait pemanggilan Notaris untuk kepentingan proses peradilan pidana dalam Pasal 66 ayat (1) UUJNP memiliki kesesuaian dengan prinsip *equality before the law*. Aturan ini merupakan hal yang wajar dan tidak bertentangan dengan asas persamaan dihadapan hukum karena Notaris merupakan pejabat umum yang wajib dijaga harkat, martabat dan jabatannya. Namun demikian, untuk diri pribadi seorang Notaris tetap berlaku prinsip *equality before the law* sama seperti warga negara lainnya.

Kata Kunci: Majelis Kehormatan Notaris, Pemanggilan Notaris, Proses Peradilan Pidana, Prinsip *Equality Before The Law*

¹Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (vaniatwidesyadinda@mail.ugm.ac.id).

²Dosen Magister Keotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (supriyadi@ugm.ac.id).